

Sumatera Ekspres

http://www.sumeks.co.id email: redaksi.harian@sumeks.co.id
SUJIP No.095/SK/MENPEN/17/1986 Tgl 10 Maret 1986 Terbit sejak 2 Agustus 1982
Alamat Redaksi/Sirkulasi: Gedung Graha Pena Palembang, Jalan Kol H Barlian No 773 Palembang,
Telepon (0711) 411766, 415263, 415264, 415600. Fax (0711) 415286, 420066
Perwakilan Jakarta: Komp Wicak Indah Blok A3 Jl Palmerah Barat No 362 Tlp (021) 5330976 Fax (021) 5322529

Penyimpin Umum: H Suparno Wonokromo. **Penyimpin Perusahaan:** H Subi Samawi. **General Manager:** H Subi Samawi. **Wakil General Manager:** H Mahmud. **Pemimpin Redaksi:** H Mahmud. **Wakil Pimpinan Redaksi:** Karsono. **Narasumber Redaksi:** Andriawan, Widi Nugroho, Koordinator Upadan: Ghuliasari. **Redaktur:** Zulherani, Erlina Dethi Rosemary, Muhammad Irfan Bahri, Nuzula Rina Riyani, Martha Hendratno, Ade Rizald, Ramadhan Evris, Edward Desmanera, Ed Triono, Rendi Fachlan, Juher. **Staf Redaksi:** Dendi Romi, Neri, Ad Fatholah, Anhar Fahrurrot, Agustawan, Imayes, Kharizmasik, M Fajar Wiliz, Ardika Wahyuni, Abdul Malik, M Rian Saputra, Del Aptari, Hendro, Gita Wilaya, Welly Dedy Anjeto, Ardians, Dian Cahyani, Kiki Wicandari, Berry Suchan Putra. **Wartawan Jakarta:** Syehan Martono, Kumaid, A Rizka Parliw. **Wartawan Daerah:** Irvan Haidun (Lubuklinggau), Aryan Malik (Musi Rawas), Iman Rustandi (Empat Lintang), Aini Daryani (Pagaralam), H Iwan Irawan (Luar), Gus Mursi, Anwar Bangsanen (OKU), Berry Santoso (Muara Enim), Eka Prasetyo (Pabundari), Eder Sagara (OKU Timur), Did Indrawati (OKU Selatan), Quata Akta (Banyuwangi), Kudi Aprandi (Musi), Sandran Dellep (Ciganjur), H Huci Ahmad (OKU), Tomi Kusawan (Sungai Lela), Heri Febrina (PALU). **Sekretaris Redaksi:** Hilda Satrio. **Fotografer:** Evan Zumalki, Aza Salemi, M Hista, Alsey Ibrahim. **Design Grafis:** Erwan Tri Cahyo, Achmad Nur Hasan, Alfananyah, Ahmad Fadi, M Jehan Manggata. **Copy Editor:** Kira Jan Faradilla, Burmanayih, Lia Hendriksa, Eka Fitriana, Muchlis. **Pracetak:** Atmuhajir (Manajer), KM Halim, Fani Jaya, Hasyim Chandri, Ed Pomono, Dandy Hendris, Mero Alfananyah, Wilhy Janen, Nanda Saputra Warsah, Muhammad Romadhon, Riyi Andika Pratomo, Denny Mataru.

Manajer Advertising: Yunita Ayu. **Manajer Advertising Area Palembang:** St. Rendi Irawan. **Manajer Advertising Area Jakarta:** Rosnili. **Marketing Palembang:** Lisa Lestari, Dwi Kartini, Muli Helmi, Erlina, Henry Yusra-lina, Sujanjo, Rachmat Santoso, An Abedi, Shofiatun Khasanah, Wilen Suhendra, Herman Jumasari, Ariyanto. **Marketing Jakarta:** Ravi Ramadhany, Wadi Floranto, Ahmad Fitrianyah, Dody Suryawan. **Desain Ilustrasi:** Husein Mubarak, Dede Aprilady, Saryana. **Keuangan:** Mawani (Manajer), Tandy, Ivana Budi, Rizka Dwi Feni, Mardiah Eka Wati. **Pemasaran:** A Rosid (Manajer), Rappi Darmawan, Dian Kuntadi, Nova Yanti, Fitriani, Sukemi, Sabrin Rusli, Bustar, Fikri, Abu Thallid, Umam dan SDH: Hanika Abdullah (Manajer), Windy Siska, Isakawan, Beni Saputra, Nazrudin, Rully Iskandar, Jumar Suprianto, Ahmad Hidayat. **IT/EDP:** Yudha Pranata, Rachmat Aprianto, Ledan Yopatra. **Humas:** Anto Narasoma, Anton Emelison. **EO:** Zulfur Agustina, Laily Yunita, Ismail Aulia Nugraha.

Tarif Iklan: Iklan beris Rp15.000,- per baris (maksimum 8 baris). **Iklan Display** (jumlah/gang/lebar) BW halaman dalam Rp50.000,- per mm kolom. **Iklan Warna** halaman 1 full colour (FC) Rp135.000,- per mm kolom, halaman dalam FC Rp70.000,- per mm kolom. **Iklan Sosial BW** (juka Cita) Rp7.000,- per mm kolom. Harga langganan Rp75.000,- dan untuk luar kota ditambah ongkos kirim. (No rekening Sumatera Ekspres, Atas nama PT Citra Bumi Sumatera) BNI: 007 057 3123. DANAMON: 008 231 979. SUMSELBABEL: 150 305 1214. MEGA: 010 660 011 002 772. BRI: 0342 01 000 338 306. BCA: 021 097 2526. MANDIRI: 112 000 109 9519. **Penerbit:** PT Citra Bumi Sumatera. **Komisaris Utama:** H Alwi Hamu. **Komisaris:** H Nurhayati, Lukman Sellawan, Ny Helmi Matur. **Direktur Utama:** H Suparno Wonokromo. **Direktur:** Dwi Nurmanawan.

Divisi Perusahaan Grup Sumatera Ekspres: Murtoko BM, Yenthar, Tri Hartono, Solihin, Purwadi, Jhon Kenedy, A Aziz, Sudemo, Syahli Gani, Hendra Syahina, Aan Sartana, Leni Madina, Doni Ramadono, Mukhlis Tanjung, Anis Susilo, Abdul Kadir, Alimin Eka Prasema, Tri Nurwanto, M Iqbal, David Aryanto, Okta Fery, Triyono Jusaidi, Sihet Judri, Sirosudin, Hari Budiyanto, Kemas A Rizal, Wilen Kusriawan, Novi Hartanto, Budiman, Irfan Ruzdarohay, A Arpan.

Penyeta: Persewaan PT Sumsel Intermedia (lasi di luar tanggung jawab persetakan). **Divisi percetakan:** H M Zaidul (General Manager), Hj Eni Hartati (Manajer Keuangan & Accounting), Zulkaemin (Kapala Bagian), Sulhan (Wakazag), Sahawan, Namsang Purnomo (Koordinator Maintenance), D Opeunggu (Listrik), Supra Yogi, Heri Suryono, Asip Yuliana, Andrian Saputra (Adm dan Umum), Suwandi (Getak Sheet), Zaidin, Bambang Heryanto, Hendra, Dody Saputra, Rahmat Hidayat, A Salam, Ojeterina (Kasir), Achmad Wahyudi, Kusri Riady.

-Wartawan Sumatera Ekspres selalu dibekali press card (kartu pers).
-Wartawan Sumatera Ekspres tidak boleh memamerkan nama apa pun dari zona sumber.

Pemilukada Melalui DPRD: Melahirkan Mudarat atau Syafaat Politik?

MASIH segar barangkali dalam ingatan kita, pasca-ditetapkannya otonomi daerah per 1 Januari 2000, maka secara perlahan namun pasti merubah perjalanan proses rekrutmen kepala daerah. Proses rekrutmen kepala daerah melahirkan perubahan iklim konstelasi politik di daerah.

Kepala daerah sebagai ujung tombak pembangunan daerah akhirnya ditetapkan harus dipilih langsung oleh rakyat. Setelah sekian lama hanya dipilih secara perwakilan melalui DPRD.

Inilah konteks mendasar tumbuh-kembangnya harapan baru dalam memperkuat upaya konsolidasi demokrasi di daerah sekaligus meneguhkan bentuk partisipasi politik rakyat. Di mana rakyat menjadi penentu dalam pemilihan kepala daerah. Dan sejak 2005, bergulirlah pemilihan langsung kepala daerah yang dikenal dengan pilkada. Selanjutnya berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pasca-ditetapkan UU No 32/2004 sebagai pengganti UU No 22/1999.

Selanjutnya produk pilkada dan pemilukada, harus diakui, banyak melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas serta syarat prestasi. Iklim demokrasi di daerah menjadi lebih bergairah. Proses politik beserta pernak-pernik "terdistribusi merata", tidak hanya didominasi oleh elite politik atau personifikasi wakil rakyat yang dijalankan oleh (anggota) DPRD.

Kini setelah hampir lima belas tahun, konstelasi politik pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, wacana bahwa pemilukada langsung lebih banyak melahirkan "mudarat politik", menjadi alasan utama partai politik untuk merumuskan undang-undang baru yang akan mengembalikan pemilukada langsung cukup dipilih oleh DPRD.

Sontak saja, fenomena ini menimbulkan pro dan kontra. Nuansa kepentingan politik jangka pendek pasca Pileg dan Pilpres 2014 sangat kental terasa. Balas dendam politik menjadi kata yang sering dilontarkan banyak pihak akhir-akhir ini. Sebab, mengembalikan pemilukada langsung ke model pemilihan DPRD adalah kemunduran demokrasi. Bahkan, melenyapkan jejak-jejak perjuangan reformasi politik di negeri ini.

Kalau pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD provinsi, mungkin masih dapat dimaklumi. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang menjalankan tugas perbantuan (*midebewind*), bahkan rakyat setuju-setuju saja jika gubernur langsung ditunjuk oleh presiden dengan hak prerogatifnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Tapi bagaimana dengan bupati/wali kota jika harus dipilih kembali oleh DPRD? Sementara sentra otonomi daerah ada di level (diberikan kepada) pemerintah kabupa-



OLEH
HENDRA ALFANI,
S.SOS., M.I.KOM*

ten/kota, sesuai amanat undang-undang dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya. Apakah langkah itu tidak mencederai kedaulatan rakyat? Atau bahkan memundurkan proses demokratisasi sepuluh langkah ke belakang?

Jikalau pemilukada langsung dikatakan banyak menimbulkan masalah, seperti konflik horizontal di tengah masyarakat, sesungguhnya elite politiklah yang menjadi aktor di balik konflik itu. Bukan rakyat! Sebab, demokrasi kita sedang berproses.

Kalaulah dikatakan bahwa pemilukada langsung menelan biaya yang besar, proses demokratisasi memang membutuhkan biaya. Tapi kan semuanya ada dalam konteks dan substansi yang terukur. Bahkan dapat dikatakan terkontrol dan terkendali.

Saya percaya kalau demokrasi dalam jangka pendek tidak dapat memastikan atau

bahkan menjanjikan stabilitas (politik). Tetapi saya sangat yakin, kalau dalam jangka panjang proses demokratisasi itu akan melahirkan keteraturan. Sebab, model pemilukada langsung adalah model yang menghormati kedaulatan rakyat. Maka prinsip pemilu dari, oleh, dan untuk rakyat harus tetap dipertahankan-diperjuangkan. Sebab, *vox populi vox dei*. Suara rakyat adalah suara Tuhan.

Oleh karena itu, upaya politik parpol di DPR RI yang akan mengembalikan pemilukada langsung ke pemilihan di DPRD, dalam pandangan saya adalah langkah yang jauh mundur ke belakang. Tindakan itu sama saja melecehkan kedaulatan rakyat dan akan menghancurkan pondasi demokrasi sebagai produk reformasi yang sudah hampir lima belas tahun kita bangun bersama.

Maka, sikap tegas menolak pemilukada langsung akan dikembalikan ke DPRD, saya kira bukanlah tindakan yang emosional. Tapi sebuah kerangka berpikir substantif untuk memaknai agar kedaulatan rakyat dan demokrasi kita tidak diledakkan atau bahkan dilecehkan oleh kepentingan segelintir elite politik. Atas nama kedaulatan rakyat dan demokrasi, rakyat (di daerah) harus tetap berperan aktif memilih langsung pemimpinnya.

Mana yang lebih berpeluang melahirkan mudarat politik? Pemilukada langsung atau pemilukada yang diali-

hkan ke DPRD? Dan mana yang lebih menghadirkan syafaat politik? Pemilukada langsung, atau pemilukada yang dialihkan ke DPRD?

Bagi kita yang menyadari sekaligus menghormati kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi (*democracy values*) tentu akan memilih bahwa pemilukada langsunglah yang berpeluang lebih banyak melahirkan syafaat politik bagi rakyat. Sedangkan pemilukada melalui DPRD-lah yang akan sangat berpeluang melahirkan mudarat politik.

Mari dengan hati jernih kita berpikir untuk menyikapi persoalan ini. Agar kita tidak terjebak pada pilihan langkah yang keliru. Dan terus berharap, bahwa kedaulatan rakyat dan menyuburnya nilai-nilai demokrasi akan tetap terjaga dan terkonsolidasi.

Sebab, sekali lagi saya ingin mengatakan, bahwa: saya percaya kalau demokrasi dalam jangka pendek memang tidak dapat memastikan atau bahkan menjanjikan stabilitas (politik). Tetapi saya sangat yakin (mungkin juga Anda semua yakin), kalau dalam jangka panjang proses demokratisasi itu akan melahirkan keteraturan. Dan lima tahun terakhir kita sudah bisa melihat, bahwa keteraturan politik itu sudah mulai bersemi. Haruskah ia layu sebelum berkembang? Tabik!

*) Direktur Eksekutif
Lingkar Prakarsa Institute
dan Dosen FISIP UNBARA

Masih Mendominasi

■ UNGGULAN...
Sambungan dari hal 1

Sumsel ditunjuk sebagai salah satu provinsi tuan rumah Asian Games XVIII 2018 sangat optimistis jika olahraga favorit itu digelar di Sumsel. "Kita sangat siap menggelar multi event sekelas Asian Games maupun Olimpiade, apalagi seluruh fasilitas olahraga sudah tersedia dan berada di satu kawasan Jakaring Sport Center (JSC)," beber Alex. Sambung mantan bupati Musi Banyuasin tersebut, Sumsel memiliki pengalaman menggelar multi event ber-

tunggul putra, tunggal putri, ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Hasil pertandingan menunjukkan para pemain Indonesia tetap mendominasi. Pemain non unggulan pun mampu menghentikan perlawanan pemain unggulan seperti Iman Adi Kusuma Atmaja menyudahi perlawanan Muhammad Ahdial Octa Khairulloh unggulan ketiga 21-8, 21-17. Kemudian pada ganda putra, Rendi Ismanto/Nathaniel Esnestan (unggulan kedua) harus tumbang dari Ramadiasnya/Rivov dengan skor 21-11, 21-11. Namun pemain Timnas Indonesia,